

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA TAHUN 2013 DAN 2018 DI KECAMATAN
PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

ROPIAH HARAHAHAP

1502060029



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 05 Oktober 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

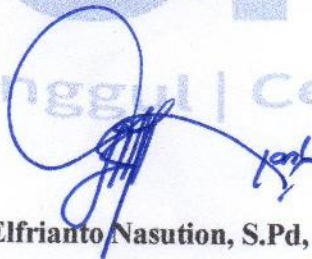
Nama Lengkap : Ropiah Harahap
NPM : 1502060029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

PANITIA PELAKSANA

Ketua,



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

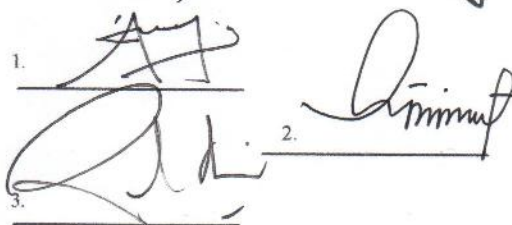
Sekretaris,



Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Amini, M.Pd
2. Hotma Siregar, S.H, M.H
3. Dr. Zulkifli Amin, M.Si





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Webside : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Ropiah Harahap
NPM : 1502060029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
sudah layak disidangkan.

Medan, September 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si

Diketahui oleh :



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.

Ketua Program Studi

Lahmuddin, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ropiah Harahap
N.P.M : 1502060029
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Analisis Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019

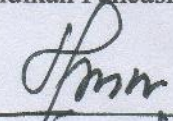
Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Ropiah Harahap

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Lahmuddin, SH, M.Hum

ABSTRAK

Ropiah Harahap. 1502060029. Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Skripsi 2019. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. 2) Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam partisipasi politik masyarakat pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis faktor dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari hasil temuan pada objek penelitian yaitu partisipasi politik masyarakat Kecamatan Padang Bolak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 terlihat dalam daftar pemilih tetap berjumlah 41.375, yang ikut serta dalam menggunakan hak pilih berjumlah 27.341 (66%), dan yang tidak ikut serta menggunakan hak pilih berjumlah 14.034 (34%). Sedangkan pada tahun 2018 terlihat dalam daftar pemilih tetap berjumlah 28.806, yang ikutserta dalam menggunakan hak pilih berjumlah 22.029 (75%), dan yang tidak ikutserta menggunakan hak pilih suara berjumlah 7.481 (25%). Dari analisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 terlihat bahwa partisipasinya meningkat atau cukup tinggi.

Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan kenikmatan, rahmat, tauqik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan peneliti skripsi yang berjudul: “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada tahun 2013 dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat salam kepada khotamul Anbiya’ Nabi Akhiruz zaman yang telah membawa risalah dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Elfrianto Nst, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Lahmuddin, S.H, M.Hum.** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Zulkifli Amin, M.Si.** Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, saran dan nasehat selama penulisan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pegawai biro fakultas FKIP UMSU yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis dan kelancaran administrasi selama menjalani perkuliahan.

6. Bapak Ongku Syah Harahap, selaku ketua Komisi Pemilihan Umum beserta jejerannya yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Taslim Harahap dan ibunda Mawar Siregar, Abang saya Abdul Karim Harahap, Lomo Martua Harahap, Hendra Parnaungan Harahap, Kakak saya Mas Nurida Harahap, Yuni Yanti Harahap beserta keluarga yang telah memberikan do'a dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis Siti Nurmala Harahap S.Pd, Yuni Adisari, Imawati Limbong Risa Juliandari beserta teman-teman FKIP PPKn angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Medan, September 2019

Hormat Penulis

Ropiah Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Analisis	9
2. Politik.....	10
3. Partisipasi Politik	10
a. Pengertian Partisipasi	10
b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	12
c. Faktor-Faktor Partisipasi Politik	15
d. Tipologi Partisipasi Politik	17
4. Pemilihan Umum	19
a. Pengertian Pemilihan Umum	19
b. Asas dan Sistem Pemilihan Umum	21
B. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
B. Objek dan Subjek Penelitian	26
C. Metode Penelitian	26

D. Variabel Penelitian.....	27
E. Definisi Operasional	27
F. Instrument Penelitian	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Profil Kantor KPU Gunung Tua.....	31
2. Visi	32
3. Misi.....	32
4. Struktur Organisasi Pegawai Kantor KPU	33
5. Rekapitulasi Jumlah DPT Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 dan 2018 Oleh KPU Gunung tua Di Kecamatan Padang Bolak.....	35
6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Di Kecamatan Padang Bolak Oleh Komisi Pemilihan Umum	38
7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Oleh Komisi Pemilihan Umum	41
B. Pembahasan.....	44
1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak kabupaten padang Lawas Utara.....	40
2. Faktor Penyebab Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data DPT Mahasiswa	4
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual.....	24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Komisioner dan Sekretaris KPU	31
Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama Kasubbag KPU	32
Tabel 4.3 DPT Tahun 2013	34
Tabel 4.4 DPT Tahun 2018.....	36
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 2013.....	39
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 2018.....	41
Tabel 4.7 Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 3 Dokumentasi
From K 1
From K 2
From K 3
Berita Acara Bimbingan Proposal
Lembar Pengesahan Proposal
Berita Acara Seminar Proposal
Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
Surat Keterangan
Surat Pernyataan Plagiat
Surat Permohonan Perubahan Judul
Surat Izin Riset
Surat Balasan Riset
Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu ciri negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah melaksanakan kegiatan pemilihan umum (Pemilu).

Hal ini menunjukkan bahwa di negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara Indonesia ini, pemilihan umum dapat menjadi tolak ukur atau acuan utama dalam berlangsungnya kehidupan negara yang demokrasi. Kesadaran warga negara dapat dilihat dan diukur dari keaktifan mereka dalam kegiatan politik, khususnya keikutsertaan warga negara dalam kegiatan pemilu.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Namun proses rekrutmen ini tidak kondusif terhadap proses politik yang demokratis di daerah, justru semakin buruk, terutama dengan praktek money politic (politik uang) dalam proses pemilihan, maupun dilihat dari kualitas dan kapabilitas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks ini, partisipasi yang diinginkan adalah proses transformasi kepentingan *public* dalam ranah struktur politik, dipilih dan memilih sesungguhnya merupakan posisi yang sama, yakni berpartisipasi

dalam dunia politik. Ketika masyarakat aktif dalam dunia/ranah politik, mereka mengatakan bahwa inilah bagian partisipasi dalam (*system*) politik. Namun pada umumnya, partisipasi politik masih dimaknai pendek oleh masyarakat, yakni partisipasi atau keikutsertaan warga Negara (masyarakat) dalam kegiatan memilih baik itu mencoblos atau mencontreng di TPS (tempat pemungutan suara) waktu pemilihan.

Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floating mass (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.

Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia ini, pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Karena dalam proses pemilihan umum ini rakyat menjadi pihak yang sangat berpengaruh dan paling menentukan dalam kelangsungan proses pemilihan umum, yaitu dengan rakyat memberikan hak suaranya. Pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar bagi masyarakat Indonesia, karena pada momen dan kesempatan inilah masyarakat memilih secara langsung pemimpin mereka. Melalui pelaksanaan pemilu juga memungkinkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka untuk memilih pemimpin yang lebih baik sesuai dengan yang di cita-citakan.

Pemilu juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menaruh harapan yang lebih baik kepada para pemimpin yang telah mereka pilih sesuai kehendak dan hati nurani, agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ada beberapa jenis pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, diantaranya adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati, dan Pemilu Walikota. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara yang mencerminkan sikap berperilaku politik dalam negara demokrasi. Dalam hal ini, warga negara mempunyai peran penting dalam perubahan suatu negara yaitu melalui pemilihan umum. Karena pada dasarnya, kekuatan pemilihan dari warga negara yang akan mampu menghasilkan pemimpin negara yang mampu membawa perubahan dalam suatu negara. Partisipasi politik merupakan hal utama dalam konteks negara demokrasi, karena hal ini berkaitan dengan kesadaran warga negara dalam segala aktivitas dan tindakan politik.

Melalui pemilu akan terwujud suatu mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan mendapat pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta pergantian pemerintahan secara teratur. Selain itu, bentuk kehidupan di masyarakat adalah seperti dalam memberikan hak suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adapun masalah yang terdapat didalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Padang Lawas Utara pada penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan wakil gubernur di tahun 2013 dan 2018 yaitu, masih adanya terdapat masyarakat yang kurang memahami apa sebenarnya makna dari ikut serta dalam pemilihan umum, juga banyak masyarakat yang tidak mau untuk ikutserta dalam menggunakan hak pilih dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kontribusi dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur.

Adapun data dari KPU Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 dan 2018 masyarakat yang terdaftar sebagai data pemilih tetap. Perhatikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah DPT

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tahun 2013	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tahun 2018
Kecamatan Padang Bolak =41.223	Kecamatan Padang Bolak =28. 806

Sumber : Data KPU Gunung Tua

Dari tabel diatas terlihat jumlah daftar pemilih tetap pada tahun 2013 berjumlah 41.223 orang, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap pada tahun 2018 berjumlah 28.806. Perbedaan jumlah DPT tersebut karena terjadinya pemekaran kecamatan padang bolak dengan menambah kecamatan padang bolak tenggara sehingga jumlah daftar pemilih tetap kecamatan padang bolak di tahun 2018 berkurang. Dengan demikian partisipasi politik dari masyarakat sangatlah berpengaruh besar terhadap berlangsungnya suatu pemilihan umum pada penyelenggaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara pada tahun 2013 dan 2018, secara langsung dapat

menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpinnya serta yang akan menjadi perwakilan bagi rakyat yang mampu untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan yang diharapkan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bedasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, agar dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang berkenaan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018.
2. Tingginya sikap apatis masyarakat dalam bidang politik.
3. Banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golongan putih.
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

C. Batasan Masalah

Setelah dikemukakan latar belakang dan identifikasi masalah yang akan diteliti, maka penulis akan membuat pembatasan masalah

Adapun yang menjadi pembatasan dan focus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat yang terdapat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa faktor penyebab meningkat/menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab meningkat/menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan berguna untuk menguatkan dan memberikan dukungan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara teoritis serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait dengan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat dalam

pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2000) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso Dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).

2. Politik

Menurut Rod Hague (dalam buku Meriam Budiardjo, 2008 : 16) “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”.

Menurut Andrew Heywood (dalam buku Meriam Budiardjo, 2008 : 16) “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerja sama”.

Menurut Maran dalam Susilo (2003: 4) mengatakan, “politik merupakan studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau negara menyangkut proses penentuan dalam pelaksanaan tujuan-tujuan”.

Menurut F. Isjwara (2010: 42) “ Politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan”. Selain itu Menurut Kartini Kartono (2011: 464) bahwa “Politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk

menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat”.

Menurut Ramlan Surbakti (2010: 21) mengatakan “ Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”.

3. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Budiardjo (2008: 367) menyatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah”. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Menurut Ramlan Subakti (2007 : 140-141) “partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya, sesuai dengan istilah partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik”. Sementara menurut Michael Rush & Philip Althof (2001:147)

menjelaskan “partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum”.

Menurut Sitepu (2012 : 92) “Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun secara kelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi”.

Menurut Herbert Miclosky (Elly M. Setiadi, 2013 : 129) mengemukakan “Bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Sedangkan Norman H. dan Sidney Verba mengemukakan “Batasan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat”.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat didefinisikan bahwa Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah, yang bisa diwujudkan melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti mengikuti kampanye,

pemungutan suara, lobby politik dan diskusi politik serta membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan.

Untuk mengukur partisipasi politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti diskusi politik
2. Mengikuti kampanye politik
3. Menggunakan hak suara di TPS

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam Budi Suryadi (2007 : 129) yaitu "Kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan".

Sementara itu menurut Rosenau dalam Arifin Anwar (2015 :35) bentuk partisipasi politik terdiri atas dua jenis. Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media yang secara aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati tetapi giat melakukan komunikasi dengan pemimpin politik atau politikus dipemerintahan.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip dalam buku “pengantar sosiologi politik” (2013 : 146-147) partisipasi politik dapat dibagi menjadi lima bentuk, yaitu : (1) kegiatan yang berkenaan dengan pemilihan umum; (2) lobbying; (3) kegiatan organisasi politik; (4) kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan; dan (5) memengaruhi proses politik dengan kekerasan. Pertama, kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk pertama (pemilihan umum) antara lain menjadi calon dalam pemilihan umum, memilih dalam pemilihan umum, memberi sumbangan untuk dana kampanye partai atau calon tertentu, berkampanye dari rumah ke rumah untuk partai atau calon tertentu, bekerja pada salah satu unit kegiatan dalam proses pemilihan umum, dan menjadi pendukung setia dan panatik partai politik satu calon tertentu (memasang tanda gambar partai dan calon tertentu dalam mobil atau rumah sendiri). Kedua yang dimaksud dengan kegiatan lobbying adalah kegiatan individu atau kelompok untuk memengaruhi secara langsung (tatap muka) dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik tertentu dalam rangka mendukung atau menentang suatu rancangan keputusan pemerintah tertentu. Ketiga, keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik tertentu secara aktif atau menjadi pengurus suatu organisasi partai politik merupakan bentuk partisipasi politik yang ketiga. Mengapa menjadi anggota aktif atau menjadi pengurus partai politik dikategorikan sebagai partisipasi politik hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa fungsi partai politik selalu berkaitan dengan pemerintah dan proses politik pada umumnya yaitu memudahkan berbagai kepentingan dalam masyarakat kedalam berbagai alternative kebijaksanaan umum untuk kemudian perjuangkan kepada pembuat

keputusan, dan mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui proses pemilihan umum dan cara politik lain yang dianggap tepat. Oleh karena itu menjadi anggota aktif atau menjadi pengurus suatu partai politik akan dengan sendirinya terlibat dalam kedua atau salah satu dari fungsi tersebut. Keempat, bentuk partisipasi politik yang keempat adalah mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya yang mengadakan kontak ini biasanya seorang individu actor politik, misalnya dengan mengirim surat kepada pejabat pemerintah yang berwenang atas hal yang dituntut atau yang diperlakukannya. Kelima, kegiatan politik kekerasan ini secara umum dapat dibagi menjadi tiga : (1) kegiatan politik yang bertujuan mengubah atau mengganti pimpinan politik/pemerintahan yang ada, seperti kegiatan politik kudeta atau pembunuhan politik, (2) kegiatan politik yang bertujuan mengubah kebijaksanaan umum yang ada, seperti protes, huru-hura, demonstrasi, dan pemberontakan; (3) kegiatan politik yang bertujuan mengganti seluruh system politik yang ada, seperti revolusi. Jadi baik kudeta, pembunuhan politik, demonstrasi, protes, huru-hura, pemberontakan maupun revolusi apakah berhasil atau tidak berhasil pun semuanya itu dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik.

Colin Mc Andrews (dalam Mas' oed, 2000 : 47), mengatakan bentuk bentuk partisipasi politik terdiri dari :

- a) Konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

- b) Non Konvensional yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perang gerilya dan revolusi.

Bentuk-bentuk dari frekuensi partisipasi politik di atas dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Agar penelitian ini lebih baik menurut Colin Mc Andrews yaitu pemberian suara, diskusi politik dan kampanye.

c. Factor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku “memahami ilmu politik” (2007 : 144) factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

- a) Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup.
- b) Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dapat atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Dalam buku “pengantar sosiologi politik” (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2013 : 149) untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi politik dapat digunakan dua kerangka teori (pendekatan politik), sebagai berikut:

a) Pendekatan kontekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik).

Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya), dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lain, bagi pendekatan ini individu actor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentukan, bukan menentukan. Pendekatan ini acap kali disebut pendekatan disposisional atau non-intensional, termasuk didalamnya teori belajar (learning theory) dan teori kepribadian.

b) Pendekatan individual – psikologis. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional (tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil factor psikologis yang memengaruhi actor politik pada peringkat bawah sadar.
- 2) Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

d. Tipologi Partisipasi Politik

A.Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

- 1) Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- 2) Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- 3) Golongan Putih (golput) atau sekelompok apatis, menganggap system politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

- 1) Partisipasi Politik Apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Partisipasi Politik Spector, yaitu orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) Partisipasi Politik Gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan bekerja kampanyenya dan aktivis masyarakat.
- 4) Partisipasi Politik Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari system politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus ke dalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pilgub merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Sedangkan Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik

normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan.

4. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Sebagai konsekuensi warga negara yang tinggal di negara penganut sistem demokrasi adalah mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menyalurkan hak politiknya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah pengejawentahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan, Michael Rush (2013:87).

Pemilihan umum merupakan sarana asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan tanda legasi hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya (Sodikin, 2014:5)

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah wahana yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk melaksanakan haknya dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain beberapa definisi di atas Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa “Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Secara umum pemilu merupakan perangkat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum”.

Marulak Paradede (2014:85) mengemukakan “Salah satu alasan pentingnya dilaksanakan pemilihan umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan atau setidaknya memperbarui

keepakatan pihak warga negara, mempengaruhi perilaku warga negara dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang memaksakan untuk mempertahankan kekuasaanya”.

Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian pemilihan umum adalah wujud dari implementasi pelaksanaan demokrasi dimana rakyat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan pilihan hatinya .

b. Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil). Adapun yang dimaksud dengan asas “Luberjurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 08 Tahun 2012 asas pemilihan umum meliputi:

- a) Langsung, rakyat mempunyai hak untuk memilih secara langsung sesuai dengan pilihan hatinya.
- b) Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

- d) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e) Jujur, pada saat pelaksanaan pemilihan umum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Adil, pada setiap pemilu, partai politik diberikan kesempatan yang sama.

Demikian asas dan sistem yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Melalui penerapan sistem dan asas tersebut diharapkan sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang bermartabat dan menjadi contoh pelaksanaan sistem demokrasi yang berhasil di negara yang sangat majemuk.

B. Kerangka Konseptual

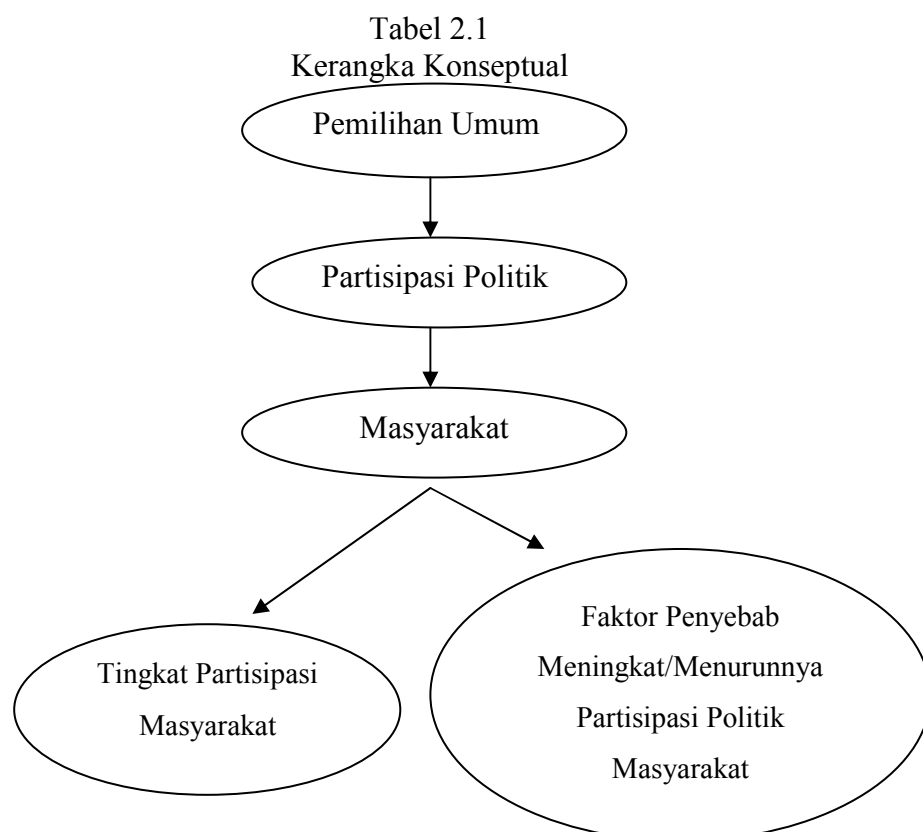
Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dibuat kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka pemikiran yang menyangkut konsep tahap-tahap penelitiannya secara teori.

Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam system demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta

salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warganegara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian untuk menjadikan masyarakat yang berpartisipasi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap pemilihan umum dibutuhkan usaha dari inspirasi dari pemerintah dan para ketua dan anggota partai politik supaya dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi dalam berbagai macam partisipasi seperti pemberian suara, diskusi politik dan kampanye.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor KPU Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun alasan penulis melakukan lokasi penelitian tersebut karena dekat rumah dan terjangkau oleh si penulis.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya waktu penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																				
		Apr	Mei				Juni		Juli	Agustus				Sept				Okt				
		1	1	2	3	4	3	4	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■	■														
4	Seminar Proposal							■	■													
5	Pelaksanaan Riset								■	■	■	■										
6	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■								
7	Penyusunan dan Analisis Data													■	■	■	■					
8	Sidang Skripsi																			■	■	

B. Subjek dan Objek

a. Subjek

Menurut Arikunto (2010 : 50) “ subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk penelitian diperoleh”. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sipeneliti itu sendiri

b. Objek

Menurut Sugiyono (2012 : 297) “objek adalah yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 60) variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawaban berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan maka perlu kiranya penulis memaparkan beberapa pengertian sebagai berikut :

a. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah system, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

c. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

F. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan alat pengumpul data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Teknik observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh sipeneliti untuk memahami dan meninjau makna perilaku dari informan yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2011 : 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai pengumpul data. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Studi Dokumentasi

Menurut sugiyono (2011 : 329) “ studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, serta foto-foto kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2013 : 20) ”teknik analisis data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Ada 3 (tiga) komponen dalam menganalisis data (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2017 : 338), yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

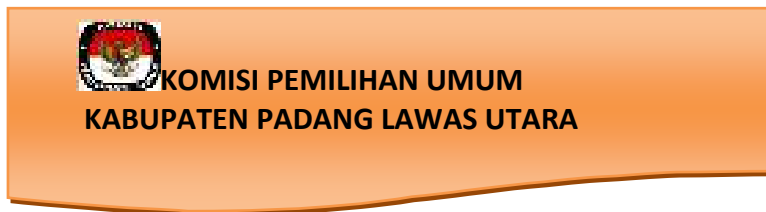
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor KPU Gunung Tua



Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kab. Padang Lawas Utara

Alamat : Jl. Nagasati Lingkungan V Pasar Gunung Tua

No Tlp. : (0635) 510850

Daftar nama-nama Komisioner dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2018-2023 yaitu :

Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Ongku Syah Harahap	Ketua KPU	Logistik dan Keuangan
2	Muhammad Nafsir Raambe	Anggota KPU	SDM & Parmas
3	Herisal Lubis	Anggota KPU	Teknis
4	Lidiyawati Harahap	Anggota KPU	Program dan Data
5	Yusran Harahap	Anggota KPU	Hukum
6	Panjang Matua Siregar	Sekretaris KPU	-

Daftar nama-nama Kasubbag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang

Lawas Utaraperiode 2018-2023, yaitu:

Tabel 4.2

No	Nama	Jabatan
1	H. Anemer Siregar	Kasubbag Umum
2	Pargadiapari Harahap	Kasubbag Proda
3	H. Sahabuddin Siregar	Kasubbag Teknis
4	Samsul Bahri Siregar	Kasubbag Hukum

2. Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas, untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

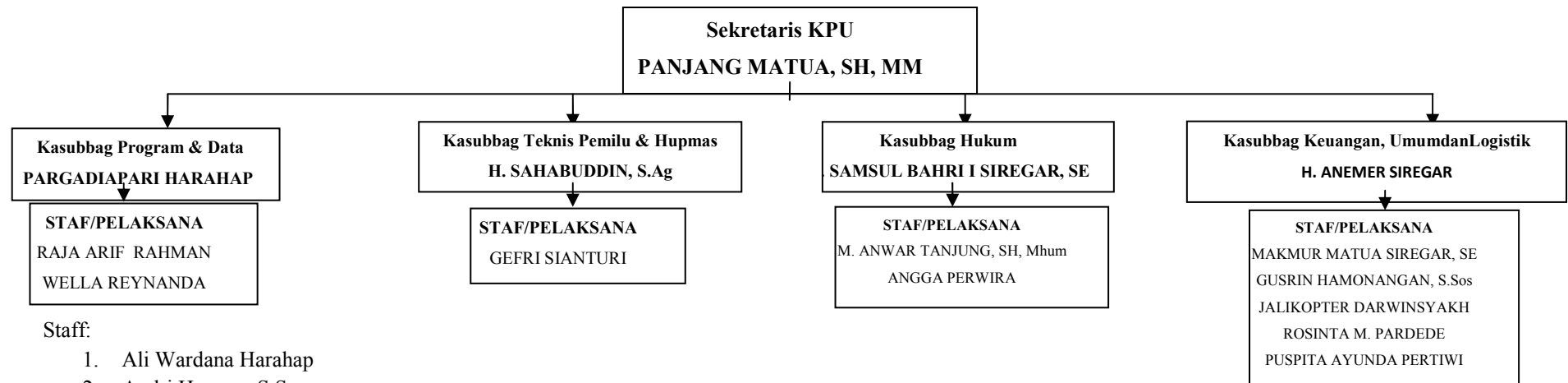
3. Misi :

1. Membangun SDM yang Kompeten Sebagai Upaya Menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang Memberikan kepastian Hukum, Progresif, dan Partisipatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu, Khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
5. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan.

6. Meningkatkan Integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

4. Struktur Organisasi Pegawai Kantor KPU

**STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
KEADAAN : JULI 2019**



Staff:

1. Ali Wardana Harahap
2. Andri Hamsar, S.Sos
3. M. Dahrin Batubara
4. Imran Hidayah Harahap S.H
5. Sari Patussuryani Harahap S.E
6. Nursaima Harahap
7. Maruli Hamongan Sitompul
8. Adi Indra Sakti Harahap

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara
Sekretaris

Panjang Matua, S.H.,M.M

5. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 dan 2018 Oleh KPU Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak

Ada beberapa jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018. Perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.3 DPT Tahun 2013

Panitia Pemilihan Kecamatan : Padang Bolak
Kabupaten/Kota : Padang Lawas Utara
Provinsi : Sumatera Utara

No Urut	Kelurahan/Desa	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Siunggam Julu	161	216	387	1
2	Siunggam Tonga	220	214	434	1
3	Siunggam Jae	193	182	375	3
4	Tanga-tanga Hambeng	137	130	267	2
5	Aek Bayur	144	139	283	2
6	Aek Tolang	163	177	340	1
7	Aek Suhat	166	160	326	2
8	Sibatang Kayu	206	189	395	2
9	Nagasaribu	191	207	398	5
10	Bangun Purba	66	77	136	1
11	Simaninggir	84	74	158	1
12	Mompang II	93	93	186	1
13	Sihoda-hoda	133	181	314	3
14	Gulangan	214	182	396	1
15	Sigama	217	181	398	2
16	Sigama Ujung Gading	130	134	264	2
17	Simanosor	123	118	241	1
18	Parlimbatan	115	118	233	1
19	Gunung Manaon II	124	144	268	1
20	Bukit Raya Serdang	51	53	104	1
21	Padang Garugur	222	227	449	2
22	Sidingkat	211	183	394	1
23	Batu Tambun	122	136	258	2
24	Tanjung Tiram	141	164	305	1
25	Garoga	78	62	140	1
26	Hajoran	141	123	264	2
27	Simandiingin Lombang	104	94	198	1
28	Simandiingin Dolok	47	45	92	1
29	Nabonggal	120	123	243	1

30	Sampuran	54	51	105	1
31	Liang Asona	92	94	186	1
32	Batu Sundung	127	129	256	1
33	Garonggang	69	69	138	1
34	Sosopan	135	142	277	1
35	Hambiri	221	253	474	1
36	Pagaran Singkam	63	57	120	1
37	Pagaran Tonga	216	228	444	1
38	Sibagasi	116	117	233	1
39	Purba Sinomba	205	202	407	3
40	Sungai Durian	205	215	420	1
41	Sungai Orosan	74	84	158	2
42	Lubuk Torop	124	129	253	2
43	Hutaimbaru II	69	63	132	1
44	Tanjung Marulak	110	116	226	1
45	Ambasang Natigor	105	123	228	1
46	Napagadung Laut	147	145	292	1
47	Rampa Jae	26	23	49	1
48	Rampa Julu	18	18	36	1
49	Sigimbal	30	33	63	1
50	Botung	30	32	62	1
51	Paran padang	26	24	50	1
52	Mananti	33	35	68	1
53	Rahuning Jae	30	40	70	1
54	Siombob	26	24	50	1
55	Sungai Tolang	53	47	100	1
56	Dolok Sae	13	10	23	1
57	Simasi	14	12	26	1
58	Sihapas-hapas	35	29	64	1
59	Batu Mamak	16	15	31	1
60	Aek Gambir	76	70	146	1
61	Purba Tua	16	16	32	1
62	Pasar Gunung Tua	268	329	597	19
63	Gunung Tua Tonga	216	257	473	2
64	Simbolon	206	203	409	2
65	Gunung Tua Jae	237	254	491	2
66	Sababangunan	186	180	366	2
67	Saba Sitahul-tahul	228	226	454	2
68	Gunung Tua Julu	208	227	435	1
69	Huta Lombang	227	232	459	1
70	Gunung Tua baru	167	184	351	1
71	Batang Baruhar Julu	218	202	420	3
72	Batang Baruhar jae	246	257	503	2
73	Aek jakkang	214	193	407	2
74	Batang Pane I	273	249	522	3
75	Batang Pane II	235	257	492	3
76	Batang Pane III	233	224	457	4
77	Losung Batu	64	59	123	1

	Jumlah	20.098	21.125	41.223	132
--	--------	--------	--------	--------	-----

Tabel 4.4 DPT Tahun 2018

Panitia Pemilihan Kecamatan : Padang Bolak
Kabupaten/Kota : Padang Lawas Utara
Provinsi : Sumatera Utara

No Urut	Kelurahan/Desa	Pemilih Terdaftar			Jumlah Tps
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Aek Gambir	93	70	163	1
2	Aek Jakkang	353	354	707	2
3	Aek Suhat	240	270	510	2
4	Ambasang Natigor	103	95	198	1
5	Batang Baruhar Jae	376	352	728	3
6	Batang Baruhar Julu	529	506	1,035	3
7	Batu Mamak	19	17	36	1
8	Batu Sundung	112	116	228	1
9	Batu Tambun	241	300	541	2
10	Botung	34	28	62	1
11	Bukit Raya Sordang	44	47	91	1
12	Dolok Sae	21	18	39	1
13	Garoga	80	67	147	1
14	Garonggang	59	72	131	1
15	Gunung Manaon II	146	150	296	1
16	Gunung Tua Baru	146	183	329	1
17	Gunung Tua Jae	437	482	919	2
18	Gunung Tua Julu	251	255	506	2
19	Gunung Tua Tonga	465	480	945	4
20	Hajoran	268	224	492	2
21	Hambiri	268	248	516	2
22	Hutaibaru II	58	64	122	1
23	Hutalombang	254	273	527	2
24	Liang Hasona	114	105	219	1
25	Losung Batu	65	54	119	1
26	Lubuk Torop	243	243	486	2
27	Mananti	30	29	59	1
28	Nabonggal	105	111	216	1
29	Napagadung Laut	154	146	300	1
30	Padang Garugur	373	397	770	2
31	Pagaran Singkam	60	59	119	1
32	Pagaran Tonga	201	215	486	1
33	Paran Padang	32	27	59	1
34	Parlimbatan	119	119	238	1

35	Pasar Gunung Tua	3,489	3,596	7,085	23
36	Purba Sinomba	827	939	1,766	4
37	Purba Tua	13	16	29	1
38	Rahuning Jae	40	50	90	1
39	Rampa Jae	28	26	54	1
40	Rampa Julu	16	15	31	1
41	Sababangunan	379	381	760	2
42	Saba Sitahul-Tahul	442	458	900	3
43	Sampuran	57	50	107	1
44	Sibagasi	95	95	190	1
45	Sibatang Kayu	271	379	650	1
46	Sidingkat	187	179	366	1
47	Sigama	375	357	732	1
48	Sigama Ujung Gading	290	277	567	1
49	Sigimbal	33	32	65	1
50	Sihapas-Hapas	36	36	72	1
51	Simandiingin Dolok	45	37	82	1
52	Simandiingin Lombang	127	100	227	1
53	Simanosor	119	106	225	1
54	Simasi	19	17	36	1
55	Simbolon	495	489	984	1
56	Siombob	25	25	50	1
57	Sosopan	133	138	271	1
58	Sungai Durian	199	197	396	1
59	Sungai Orosan	77	70	147	1
60	Sunge Tolang	42	45	87	1
61	Tanjung Marulak	121	99	220	1
62	Tanjung Tiram	163	185	384	1
	Jumlah	14.236	14.570	28.806	112

6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 di Kecamatan Padang Bolak Oleh Komisi Pemilihan Umum

Pada hari selasa tanggal dua belas bulan maret tahun dua ribu tiga belas, komisi pemilihan umum kabupaten/kota mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera utara dalam

rapat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dihadiri oleh saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pengawas pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, pemantau pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan anggota masyarakat bertempat di:

Kabupaten : Padang Lawas Utara

Provinsi : Sumatera Utara

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk ppk di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk ppk di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh ppk di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain.
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh ppk (termasuk cadangan).
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh ppk di wilayah KPU Kabupaten/Kota.
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh ppk di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- h. Jumlah surat suara tida terpakai dari seluruh ppk di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh pkk di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
 3. Keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam model DB 2-KWK.KPU.

Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera utara tahun 2013, perhatikan tabel berikut:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 2013

No	Uraian		Kecamatan Padang Bolak
1	Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap	Lk	19,791
		Pr	21,584
		Jml	41,375
2	Jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih	Lk	13,012
		Pr	14,329
		Jml	27,341
3	Jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih	Lk	6,779
		Pr	7,255
		Jml	14,034
4	Seluruh surat suara yang diterima		42,951
5	Surat suara yang terpakai		27,341

6	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	58
7	Surat suara yang tidak terpakai	15,552
8	Suara sah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur	27,042
9	Suara tidak sah	299
10	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	27,341
11	Jumlah TPS	132
12	Jumlah PPS	77

7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2018 di Kecamatan Padang Bolak Oleh Komisi Pemilihan Umum

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 bertempat di Hotel Mitra Indah Gunung tua.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panwas Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK. Perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Rekapitulasi hasil perhitungan suara 2018

No	Data pemilih dan penggunaan hak pilih		Kecamatan padang bolak
1	Pemilih dalam DPT	Lk	14,236
		Pr	14,570
		Jml	28,806
2	Pemilih dalam DPPh	Lk	52
		Pr	7
		Jml	59
3	Pemilih dalam DpTb	Lk	930
		Pr	1,017
		Jml	1,947
4	Jumlah pemilih	Lk	15,218
		Pr	15,594
		Jml	30,812
5	Pegguna hak pilih dalam DPT	Lk	9,917
		Pr	10,114
		Jml	20,031
6	Pegguna hak pilih dalam DPPh	Lk	52
		Pr	7
		Jml	59
7	Pegguna hak pilih dalam DpTb	Lk	927

		Pr	1,012
		Jml	1,939
8	Jumlah seluruh pengguna hak pilih	Lk	10,896
		Pr	11,133
		Jml	22,029
9	Pemilih ditabilitas/penyandang cacat	Lk	1
		Pr	2
		Jml	3
10	Pemilih ditabilitas/penyandang yang menggunakan hak pilih	Lk	1
		Pr	2
		Jml	3
11	Jumlah surat suara yang diterima		29,584
12	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos		74
13	Jumlah suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		7,481
14	Jumlah suara yang digunakan		22,029

Tabel.4.7 Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Rincian perolehan suara pasangan calon	Kecamatan padang bolak
1	Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	18, 959
2	Djarot Saiful Hidayat dan Sihar P.H Sitorus	2,386
3	Jumlah seluruh suara sah	21,345
4	Jumlah suara tidak sah	684
5	Jumlah suara sah dan tidak sah	22,029

B. Pembahasan

1. Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari data yang di peroleh di kantor KPU Gunung Tua, bahwa jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 41,375 orang sedangkan yang ikut serta dalam memilih atau mencoblos berjumlah 27,341 (66%) dan yang tidak ikut serta dalam memilih atau mencoblos adalah berjumlah 14,034 (34%). Sedangkan pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari data yang diperoleh di kantor KPU Gunung Tua, bahwa jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 28,806 orang sedangkan yang ikut serta dalam memilih atau mencoblos berjumlah 22,029 (75%) dan yang tidak ikut serta dalam memilih atau mencoblos adalah berjumlah 7,481 (25%). Dari data yang dianalisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tergolong tinggi atau meningkat.

Adapun upaya yang dilakukan penyelenggara KPU Gunung Tua sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat, karena penyelenggara KPU bersosialisasi dan bekerja sama dengan kepala desa dalam setiap desa untuk intruksi kepada kepala desa agar memberikan informasi kepada masyarakat bahwa menggunakan hak pilih pada hari pemilihan sangat penting untuk bangsa dan negara. Selain itu ada juga solusi yang diberikan oleh penyelenggara KPU yaitu, memperbanyak sosialisasi dan KPU membentuk relawan demokrasi yang terdiri

10 basis seperti marginal, pemula, pemilih muda, keluarga, keagamaan, perempuan, komunitas, berkebutuhan khusus/ disabilitas dan netizen.

2. Faktor Penyebab Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Tahun 2013 Dan 2018 Di Kecamatan Padang Bolak

Analisis yang diperoleh dari data diatas maka faktor penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan 2018, Karena terlihat dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu sebagian masyarakat sudah mulai menyadari bahwa partisipasi mereka sangat penting untuk menentukan masa depan kepemimpinan yang baik untuk kedepannya. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

1) Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan terhadap politik sangat penting, hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baiki, tentunya orang akan lebih mudah memahami betapa pentingnya politik dalam pemilu dan ikut serta didalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik.

2) Pekerjaan Masyarakat

Tingkat Pengetahuan dan pekerjaan masyarkat ini merupakan faktor internal, atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Biasanya orang

dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik atau malah sebaliknya, menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan seorang pemulung.

3) Tingkat Pendidikan

Selain dua faktor sebelumnya tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor internal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga memahami politik itu sendiri. Terlebih bagi pemilih yang mengalami buta huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali jalan pemimpin atau wakil rakyat atau sulit pula ketika pemungutan suara berlangsung.

4) Peran Aparat Pemerintahan

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik adalah peran aparat pemerintahan. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut. Penyelenggara pemilu, yaitu komisi pemilihan raya harus dapat mengakomodasi para pemilih, pemilih yang berkebutuhan khusus.

5) Pengaruh Kaum Intelektual

Diera informasi ini, sangat mudah rasanya menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak diantaranya kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi para konsumen media, hal tersebut

dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, atau bahkan sebaliknya, membuat mereka semakin anti pati terhadap politik.

6) Konflik Diantara Para Pemimpin Politik

Sudah umum diketahui, dengan banyaknya partai politik di Indonesia dan berbedanya tujuan serta metode mereka dalam mencapai tujuannya, akan banyak terjadi konflik politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader-kader mereka nantinya merekrut sebanyak-banyaknya warga negara untuk memberikan dukungan pada pemimpinj mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik dalam suatu negara.

Dari penjelasan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik bahwa partisipasi politik tentunya harus ditingkatkan. Karena tingginya partisipasi politik, pembangunan nasional di Indonesia akan semakin mudah dilaksanakan. Rakyat juga harus mengenali calon pemimpin politiknya agar politik di Indonesia lebih bersih dan tidak lagi menimbulkan anti pati dari masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018, terlihat dari data bahwa partisipasi politik masyarakat di tahun 2013 daftar jumlah pemilih tetap berjumlah 41,375 orang yang ikut serta dalam memilih atau mencoblos berjumlah 27,341 (65,8%) dan yang tidak ikut serta dalam memilih atau mencoblos adalah berjumlah 15,552 (34%). Sedangkan partisipasi politik masyarakat ditahun 2018 daftar pemilih tetap berjumlah 28,806 orang sedangkan yang ikut serta dalam memilih atau mencoblos berjumlah 22,029 (75,5%) dan yang tidak ikutserta dalam memilih atau mencoblos adalah berjumlah 7,481 (25%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah meningkat.

Faktor penyebab meningkatnya partisipasi politik yaitu, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilihat dari kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menggunakan hak pilih suara sesuai dengan pilihannya tidak dalam unsur paksaan. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab partisipasi politik yaitu, 1) Tingkat pengetahuan, 2) Pekerjaan masyarakat, 3)Tingkat pendidikan, 4) Peran

aparatus pemerintahan, 5) Pengaruh kaum intelektual, 6) Konflik diantara para pemimpin politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, agar dapat lebih efektif dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang baik, untuk nantinya dapat memberikan wakil pemimpin yang dapat dipercaya, jangan karena ada factor pemberian maupun imbalan.
2. Bagi KPU, agar dapat lebih matang dalam mengevaluasi sebagai bahan koreksi, serta lebih memaksimalkan dalam penyelenggaraan, memberikan ketegasan dan netral didalam pelaksanaan pemilihan umum, sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Peneliti lainnya, kepada para peneliti selanjutnya khususnya untuk mahasiswa jurusan PPKn agar dapat melakukan penelitian yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan tentunya pada sisi yang berbeda sebagai sumber dan bentuk pengembangan dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Retnoningsih dan Suharho 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang. Widya Karya.
- A, Rahman, H.I. 2007. System Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Arifin, A. 2015. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, M. 2008. Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar . Dr. Prof. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Prenadamedia group.
- Isjwara, F. 2010. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Binacipta
- Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Maran Raga, Rafael. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2014.
- Mas'oed. Mochtar dan Mac Andrew. 2000. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rush, Michael dan Althoff Phillip 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarbaini. 2015. Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum oleh: Jurnal Inovatif, Volume Viii Nomor I Januari 2015.

- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.
Jakarta: Modern English Press
- Setiadi, Elly .M dan Kolip, Usman 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:
Kencana Pranadamedia Group.
- Sitepu P Anthonius. 2012. Teori-Teori Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sodikin. 2014. Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gramata
Publishing
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
- Suryadi, B. 2007. Sosiologo Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep.
Yogyakarta: IRCiSoD.
- Susilo, Y. 2003. Menuju Keselarasan Lingkungan. Averroes Press. Jakarta

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Ropiah Harahap
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunung Tua Jae/30 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ampera VII No.40 Pondok Prada
Saudara Ke- : 6 Dari 6 Bersaudara

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Taslim Harahap
Nama Ibu : Mawar Siregar
Alamat Rumah : Gunung Tua Jae, Kecamatan Padang Bolak,
Kabupaten Padang Lawas Utara

PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2003-2009 : SD Negeri 101120 Gunung Tua Jae
2. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 3 Padang Bolak Gunung Tua
3. Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Padang Bolak Gunung Tua
4. Tahun 2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pewawancara : Ropiah Harahap

Informan : PargadiafariHarahap

1. Berapa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat kecamatan padang bolak pada tahun 2013 ?

Jawab: Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat kecamatan padang bolak pada tahun 2013 terdapat sebanyak 41.223 orang pemilih

2. Berapa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat kecamatan padang bolak pada tahun 2018?

Jawab: Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat kecamatan padang bolak pada tahun 2018 terdapat sebanyak 28.806 orang pemilih

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013?

Jawab: Dilihat dari kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mereka sudah mulai merasa bahwa memberikan suara dalam pemilihan umum itu sangat penting untuk menentukan masa kepemimpinan yang baik kedepannya.

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018?

Jawab: Dilihat dari kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mereka sudah mulai merasa bahwa memberikan suara

dalam pemilihan umum itu sangat penting untuk menentukan masa kepemimpinan yang baik kedepannya.

5. Menurut bapak apa yang menyebabkan mengapa masyarakat melakukan golongan putih (golput) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 dan 2018?

Jawab: Penyebab timbulnya golput yaitu, ada beberapa poin yang pertama karena adanya kesibukan pribadi masyarakat pada waktu dihari H pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, masih ada masyarakat yang menginginkan adanya system money politik dikarenakan mereka yang kurangnya rasa peduli terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut. Yang ketiga masyarakat merasa bahwa suara yang diberikannya tidak ada pengaruh dari satu suara yang akan diberikannya.

6. Berapa rata-rata usia masyarakat yang melakukan golput?

Jawab: Rata- rata usia masyarakat yang melakukan golput yaitu, usia 25 sampai usia 45.

7. Apakah ada konsekuensi jika salah satu masyarakat ketahuan golongan putih (golput)?

Jawab: Tidak ada, karena itu adalah salah satu hak dari mereka dan itu tidak bisa dipaksakan atau diganggu gugat.

8. Apakah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup besar dalam mensukseskan pemilihan umum?

Jawab: Sangat besar seperti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum.

9. Apakah ada solusi untuk meminimalisir jumlah golongan putih dalam pemilu di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara?

Jawab: Solusinya yaitu, memperbanyak sosialisasi dan KPU membentuk relawan demokrasi yang terdiri 10 basis seperti marginal, pemula, pemilih muda, keluarga, keagamaan, perempuan, komunitas, berkebutuhan khusus/ disabilitas dan netizen.

10. Apakah sudah ada langkah pemerintah dalam mencegah terjadinya golput, jika sudah ada langkah apa saja yang dilakukan pemerintah?

Jawab: Ada langkah pemerintah yaitu bersosialisasi dan bekerja sama dengan kepala desa dalam setiap desa untuk intruksi kepada kepala desa agar memberikan informasi kepada masyarakat bahwa menggunakan hak pilih pada hari pemilihan sangat penting untuk bangsa dan negara.

Lampiran 3

DOKUMENTASI

